

**PEMBELIAN TERSELUBUNG (UNDERCOVER BUY) SEBAGAI
STRATEGI PENGUNGKAPAN KEJAHATAN NARKOBA
(Studi Yuridis-Empiris di Kota Pontianak)**

Oleh :

**DHANI CATRA NUGRAHA,SH.,S.Ik
A.2021131087**

ABSTRACT

This thesis addresses the issue of purchase covert (undercover buy) as a strategy for drug-related crimes disclosure (juridical-empirical studies in Pontianak) .This method used in this study is a research method using Normative-Sociological approach. Undercover buy as stipulated in Law No. 22 of 1997 concerning narcotic replaced by Law No 35 of 2009 as a provision of investigator competence in combating narcotic dealing. This is due the nature of narcotic crime which is an organized, undisclosed, done with complex modus operandi and high level of technology resulting difficulties to gather evidence. On the contrary of other crimes, undercover buy didn't violate Human Rights, if done under the law. However it will differ if done discordantly based on the law. This is caused by the involvement of people to combating narcotic crime, thus their rights must be preserve. In consequence, to diminish the errors of undercover buy, investigator must know and acknowledge the procedures of undercover buy as stipulated in Law 35 of 2009.

Keywords: disclosure strategy, drug crimes, Purchase veiled.

ABSTRAK

Tesis ini membahas masalah pembelian terselubung (undercover buy) sebagai strategi pengungkapan kejahatan narkoba (studi yuridis-empiris di Kota Pontianak).Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan Normative-Sosiologis. Pembelian Terselubung sebagaimana diatur Undang-Undang No 22 Tahun 1997 yang telah diganti menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 merupakan penambahan kewenangan penyidik dalam upaya pemberantasan pengedaran narkoba. Hal ini mengingat tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang terorganisasi, rahasia, serta dalam pelaksanaannya menggunakan modus operandi dan teknologi yang tergolong canggih sehingga sulit dalam mengumpulkan barang buktinya. Berbeda dengan tindak pidana lainnya pelaksanaan pembelian terselubung dalam tindak pidana narkoba tidaklah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia bila dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi, akan menjadi berbeda bila tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan bahwa dalam pelaksanaan pembelian terselubung tidak terlepas dan peran serta masyarakat, sehingga masyarakat yang ikut serta harus dilindungi hak-haknya. Untuk mengurangi kesalahan dan pelaksanaan pembelian terselubung tersebut maka perlu diketahui dan dipahami secara jelas oleh penyidik tentang pelaksanaan pembelian terselubung itu sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009.

Kata Kunci: strategi pengungkapan, kejahatan narkoba, Pembelian terselubung.

Latar Belakang

Peredaran Narkoba di Indonesia sudah merajalela dan sangat meresakan kita semua, masuknya barang haram tersebut ke Indonesia, karena dianggap pasar yang cukup menguntungkan bagi para bandar dan pengedar baik dalam dan luar negeri, inilah yang menjadi keprihatinan serta perhatian serius bagi Pemerintah, Presiden RI Joko Widodo tidak memberikan grasi kepada bandar-bandar tersebut dan menerima hukuman mati, ini harus dilakukan kalau memang Indonesia mau mencegah barang tersebut masuk di Indonesia dan membuat efek jera, Presiden menyatakan Indonesia sudah gawat Narkoba. Program Indonesia Bebas Narkoba 2015 sepertinya sulit tercapai. Sebab, hingga kini belum ada tanda-tanda penurunan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Bahkan tahun depan pengguna narkoba di Indonesia diprediksi mencapai 5 juta jiwa.

Penyalahgunaan narkoba semakin meningkat di Indonesia. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), berdasarkan data dari UNODC (*United Nations Office On Drugs Crimes*) di dunia ada 315 juta orang usia produktif atau berumur 15 sampai 65 tahun yang menjadi pengguna narkoba dan ada 200 juta orang meninggal dunia setiap tahunnya akibat narkoba.

¹

Transaksi dan peredaran narkoba yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorganisir (*Organized Crime*) ternyata terus meningkat sehingga perlu diperlukan berbagai macam upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Penyalahguna narkoba menduduki rangking 20 dunia sebagai penyebab angka kematian dan rangking ke 10 di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Penyalahguna narkoba diketahui sangat rentan dan mudah terjangkit HIV, Hepatitis dan Tubercolis, yang kemudian dapat menular ke masyarakat umum.

Atas dasar inilah UNODC (*United Nations Office On Drugs Crimes*) menganggap penyalahgunaan narkoba merupakan masalah kesehatan. Dalam lingkup Negara Republik Indonesia, tingkat penyalahgunaan narkoba memberikan dampak yang luar biasa signifikan. Baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Berdasarkan data yang dihimpun oleh BNN, dari tingkat pembiayaan urusan yang berkaitan dengan narkoba, negara mengeluarkan anggaran sekitar 45 triliun, dengan perincian untuk membiayai Rehabilitasi, pengobatan maupun proses hukum. Angka ini sangat fantastis untuk ukuran Indonesia yang masih dalam

¹ <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/516363-bnn--pengguna-narkoba-di-indonesia-capai-4-2-juta-orang>

tataran berkembang. Oleh karenanya diperlukan kepedulian dari setiap komponen untuk bersama melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba.²

Usia muda (remaja) merupakan usia produktif yang membutuhkan perhatian khusus, karena pada posisi ini, taraf pencarian jati diri dan cenderung masih bersifat labil. Pola pikir kaum muda kadang kala hanya bersifat instan, dan mencari yang temudah mana kala menghadapi sesuatu yang sulit. Ada beberapa faktor sebagai penyebab atau yang mempengaruhi perilaku seorang remaja, diantaranya :

- a. Faktor Pertemanan
- b. Perkembangan Teknologi Informasi
- c. Pengaruh Budaya
- d. Gaya Hidup Hedonism

Beberapa faktor itulah sebagai pemicu dalam setiap pola hidup maupun dasar pemikiran seseorang, termasuk dalam hal penyalahgunaan narkoba. seringkali seorang anak muda terjebak kedalam lembah hitam narkoba hanya karena faktor pertemanan sehingga memunculkan keinginan coba-coba. Kalau kita analisa pengaruh teman sebaya menjadi metode paling ampuh untuk urusan peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan hasil mapping area terhadap peredaran narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Pontianak Kota, wilayah Pontianak Timur menjadi prioritas utama pemberantasan narkoba, terutama di daerah Kampung Beting. Hal ini disebabkan oleh kejahatan Narkoba dan kriminalitas lainnya tumbuh subur di daerah tersebut karena desakan faktor ekonomi dan sosial.

Menurut hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh keterangan bahwa keberadaan sekolah tersebut tidak jauh dengan lingkungan masyarakat yang tinggi angka kriminalitasnya, khususnya narkoba. Oleh karena itu diperlukan perhatian khusus bagi para pelajar tersebut untuk memiliki pengetahuan dan sikap yang baik mengenai penyalahgunaan narkoba. Pengetahuan, sikap, dan perilaku pelajar mengenai narkoba perlu ditingkatkan karena akibat dari penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan gangguan fungsi kesehatan, intelektual, dan sosial yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

Pengertian Narkotika seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) undang- undang nomor 35 tahun 2009 bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan

² <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/puslitdatin/artikel/10682/remaja-dan-penyalahgunaan-narkoba>.

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih dan Trend perkembangan kejahatan obat-obatan narkoba di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat tajam. Hasil analisis POLRI atas tingginya angka kejahatan tersebut salah satunya disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda hampir semua daerah di negara ini. Dengan kejadian ini, para produsen, distributor dan konsumen memanfaatkan situasi ini untuk memperbesar dan mencari keuntungan dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.³

Indonesia sekarang telah dijadikan tempat pemasaran. bahkan dijadikan sebagai produsen untuk jenis narkoba. Bila hal ini tidak ditanggulangi, akan dapat mengancam kehidupan bangsa dan negara. Sebagai contoh mulai tahun 2013 di Kota Pontianak pada umumnya tercatat ada 261 kasus penyalahgunaan narkoba baik narkoba maupun bahan berbahaya lainnya, dengan rincian 196 kasus penyalahgunaan sabu-sabu, 16 kasus penyalahgunaan ekstasi dan 10 kasus penyalahgunaan ganja. Sedangkan untuk penyalahgunaan bahan berbahaya sebanyak 39 kasus yang menyeret 332 orang baik pria maupun wanita. Sampai penutupan kalender tahun 2014 lalu, mengalami peningkatan terhadap penyalahgunaan narkoba dimana tercatat ada 293 kasus narkoba dan bahan berbahaya lainnya yang menyeret 401 orang tersangka baik pria maupun wanita dari berbagai kalangan. Dengan rincian 245 kasus penyalahgunaan sabu-sabu, 15 kasus penyalahgunaan ekstasi dan 11 kasus penyalahgunaan ganja. Sedangkan untuk penyalahgunaan bahan berbahaya sebanyak 21 kasus.

Contoh pengungkapan kasus Narkoba oleh Polresta Pontianak mulai dari pelaksanaan penyelidikan sampai dengan penangkapan pelaku tindak pidana narkoba sebagai berikut :

1. Dimulai dari Laporan Informasi dari salah seorang Informan pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekira jam. 19.00 Wiba melalui Anggota Lidik Sat Res Narkoba bahwa seseorang yang biasa disebut dengan panggilan ABONG warga keturunan Tiong Hoa yang tinggal di Jalan Husein Hamzah Kecamatan Pontianak Barat biasa menjual Narkoba jenis sabu-sabu di rumah tersebut.
2. Kemudian Kasat Narkoba Polresta Pontianak Kota memerintahkan 3 (tiga) anggota lidik untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran Informasi tersebut dari dasar laporan informasi.
3. Pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekira jam. 09.00 Wiba, 2 (dua) Anggota Lidik dengan dibantu oleh Informan memulai Penyelidikan dengan cara observasi /

³O.C Kaligis & Associates, Narkoba dan Peradilannya Di Indonesia, Cetakan ke-2. Alumni Bandung, 2007, hal 7

pengamatan terhadap tempat tinggal target operasi yang bernama ABONG di Jalan Gusti Hamzah Rt.006/Rw.005 Kecamatan Pontianak Kota serta rumah kontrakannya.

4. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekira jam. 16.00 Wiba, penyelidikan dilanjutkan dengan pengenalan terhadap target atas nama ABONG tersebut untuk mengetahui wajah dan ciri-ciri dari target tersebut.
5. Dan pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira jam. 07.00 sampai dengan jam. 19.00 Wiba penyelidikan dilakukan dengan cara pengamatan untuk bisa mengetahui kegiatan atau kebiasaan target an. ABONG menjual atau mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan diketahui bahwa an. ABONG menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada pembeli / pengguna dilakukannya di Rumah kontrakan di jalan Husein Hamzah Kecamatan Pontianak Barat. Dan untuk bisa memastikan bahwa an. ABONG benar-benar ada menjual Narkotika jenis sabu-sabu di rumah kontrakannya tersebut.
6. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2014 sekira jam. 17.00 Wiba dengan menggunakan jasa informan melakukan transaksi terselubung (*Undercover Buy*) dengan cara membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada an. ABONG di rumah kontrakan tersebut, dan dengan bantuan informan tersebut bisa melakukan pembelian secara langsung kepada an. ABONG sebanyak 1 gram sabu-sabu seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
7. Selanjutnya hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 anggota lidik bersama informan melakukan transaksi kedua (pembelian narkotika jenis sabu-sabu) terhadap an. ABONG di rumah kontrakan tersebut untuk sebanyak 1 gram. Setelah melakukan transaksi terselubung tersebut dengan berbekal Surat Perintah Penangkapan sekira jam 16.30 Wib, anggota Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota yang dipimpin oleh Kasat Narkoba melakukan penangkapan terhadap ABONG
8. Kemudian anggota lidik Satuan Reserse Narkoba melakukan Penggeledahan di seluruh ruangan di rumah Kontrakan tersebut dan hasilnya dari penggeledahan tersebut ditemukan beberapa bukti pendukung lainnya seperti seperangkat bong dan sendok sabu-sabu serta bukti lainnya, selanjutnya ABONG berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Dari kronologis kasus Tindak pidana narkotika diatas merupakan salah satu tehnik pengungkapan kejahatan narkoba yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Pontianak Kota mulai dari penyelidikan sampai dengan melakukan penangkapan pelaku tindak pidana narkotika.

Dari beberapa pengungkapan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Polresta Pontianak Kota dapat diketahui bahwa para pelaku tindak pidana narkoba ini baik pengedar tidak hanya mengedarkan dan menjual narkotika, tapi para pengedar memiliki peran ganda sebagai penjual dan juga pengguna. Dalam beberapa kasus pengedar yang tertangkap kebanyakan hanya memberikan keterangan bahwa mereka hanyalah orang suruhan, kurir atau perantara dalam suatu transaksi jual beli narkotika. Peredaran gelap narkotika di kota Pontianak yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan selalu memiliki jaringan yang terputus, dimana antara anggota jaringan saling tidak mengenal, yaitu

pemakai tidak mengenal pengedar, sedangkan pengedar yang satu tidak kenal dengan pengedar yang lain, sehingga menjadi salah satu faktor terkendalanya pengembangan kasus tersebut sampai dengan bandar narkotikanya.⁴

Hukum Pidana juga menegaskan bahwa penyalahgunaan obat-obatan dan narkotika ini, baik menggunakan atau memakai, merupakan suatu tindak kejahatan yang oleh karena itu tindakan tersebut bisa dikenai sanksi pidana. Pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkotika agar tidak semakin meluas, maka sejak tahun 1997 diberlakukan undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika. Kemudian seiring dengan perkembangan kejahatan narkotika, diperbaharui dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Undang - undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tersebut didalamnya mengatur mengenai sanksi hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Maka, dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN, seperti yang tertuang dalam Pasal 64 (1) badan inilah yang kemudian diberikan wewenang oleh pemerintah bersama dengan POLRI untuk mengungkap dan memberantas tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang sebelumnya tidak terdapat di dalam undang-undang lama serta didalamnya juga tertuang bahwa untuk obat-obatan jenis psikotropika golongan I dan golongan II telah dimasukkan menjadi golongan narkotika seperti tertuang dalam Pasal 153 huruf (b) yang berbunyi, lampiran mengenai jenis psikotropika golongan I dan II sebagaimana tercantum dalam lampiran undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 10), Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3671 yang telah dipindahkan menjadi narkotika golongan I menurut undang-undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kemudian dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka POLRI maupun BNN diharapkan mampu melaksanakan tindakan pencegahan maupun pemberantasan tindak pidana narkoba. Beberapa teknik penyelidikan yang dilakukan dalam pemberantasan tindak pidana narkoba itu mulai dari *observasi* (pengamatan), *surveillance* (pembuntutan), *undercover agen* (penyamaran petugas), *Undervocer buy* (pembelian terselubung), *controlled delivery* (penyerahan yang dikendalikan), dan *raid planning execution* (rencana pelaksanaan penggerebekan).

⁴Hasil wawancara prasurvey dengan Kanit Reserse Narkoba Polresta Kota Pontianak, diolah pada tanggal 2 Februari 2015.

Permasalahan

Bagaimana kekuatan dan akibat hukum terhadap pembelian terselubung (undercover buy) yang dilakukan bukan anggota kepolisian (informan)?

Pembahasan

Untuk mengetahui sejauh mana kekuatan dan akibat hukum terhadap pembelian terselubung (Undercover Buy) yang dilakukan bukan anggota kepolisian dapat kita liat dari beberapa kasus yang terjadi di Polresta Pontianak Sebagai Contoh kasus yang ada di latar belakang sebagai Berikut:

a. Kasus Posisi

Contoh pengungkapan kasus Narkoba oleh Polresta Pontianak mulai dari pelaksanaan penyelidikan sampai dengan penangkapan pelaku tindak pidana narkoba sebagai berikut :

- Dimulai dari Laporan Informasi dari salah seorang Informan pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekira jam. 19.00 Wiba melalui Anggota Lidik Sat Res Narkoba bahwa seseorang yang biasa disebut dengan panggilan ABONG warga keturunan Tiong Hoa yang tinggal di Jalan Husein Hamzah Kecamatan Pontianak Barat biasa menjual Narkotika jenis sabu-sabu di rumah tersebut.
- Kemudian Kasat Narkoba Polresta Pontianak Kota memerintahkan 3 (tiga) anggota lidik untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran Informasi tersebut dari dasar laporan informasi.
- Pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekira jam. 09.00 Wiba, 2 (dua) Anggota Lidik dengan dibantu oleh Informan memulai Penyelidikan dengan cara observasi / pengamatan terhadap tempat tinggal target operasi yang bernama ABONG di Jalan Gusti Hamzah Rt.006/Rw.005 Kecamatan Pontianak Kota serta rumah kontrakannya.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekira jam. 16.00 Wiba, penyelidikan dilanjutkan dengan pengenalan terhadap target atas nama ABONG tersebut untuk mengetahui wajah dan ciri-ciri dari target tersebut.
- Dan pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira jam. 07.00 sampai dengan jam. 19.00 Wiba penyelidikan dilakukan dengan cara pengamatan untuk bisa mengetahui kegiatan atau kebiasaan target an. ABONG menjual atau mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan diketahui bahwa an. ABONG menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada pembeli / pengguna dilakukannya di Rumah kontrakan di jalan Husein Hamzah Kecamatan Pontianak Barat. Dan untuk bisa memastikan bahwa an. ABONG benar-benar ada menjual Narkotika jenis sabu-sabu di rumah kontrakannya tersebut.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2014 sekira jam. 17.00 Wiba dengan menggunakan jasa informan melakukan transaksi terselubung (*Undercover Buy*) dengan cara membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada an. ABONG di rumah kontrakan tersebut, dan dengan bantuan informan tersebut bisa melakukan

pembelian secara langsung kepada an. ABONG sebanyak 1 gram sabu-sabu seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 anggota lidik bersama informan melakukan transaksi kedua (pembelian narkoba jenis sabu-sabu) terhadap an. ABONG di rumah kontrakan tersebut untuk sebanyak 1 gram. Setelah melakukan transaksi terselubung tersebut dengan berbekal Surat Perintah Penangkapan sekira jam 16.30 Wib, anggota Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota yang dipimpin oleh Kasat Narkoba melakukan penangkapan terhadap ABONG
- Kemudian anggota lidik Satuan Reserse Narkoba melakukan Penggeledahan di seluruh ruangan di rumah Kontrakan tersebut dan hasilnya dari penggeledahan tersebut ditemukan beberapa bukti pendukung lainnya seperti seperangkat bong dan sendok sabu-sabu serta bukti lainnya, selanjutnya ABONG berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.⁵

b. Analisa Yuridis Penangkapan Dengan Menggunakan Teknik Pembelian Terselubung

Analisis terhadap proses penangkapan dengan teknik pembelian terselubung ini akan dianalisis berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana. Analisis akan dilakukan dengan mengaitkan data-data yang telah diperoleh terkait dengan pelaksanaan pembelian terselubung pada prakteknya. Adapun data-data tersebut berupa S.Kep/1205/IX/2000 tentang revisi himpunan juklak dan juknis proses penyidikan Tindak Pidana, hasil wawancara dengan AKP Lusiana Feni yang merupakan wakil kepala Satuan Reserse Narkotika Polresta Pontianak, dan wawancara dengan Ipda Iwan Gunawan,SH yang merupakan Kepala Unit I Narkotika Polresta Pontianak . Adapun Hasil Analisisnya akan diterangkan di bawah ini:

a) Analisis mengenai pengaturan pelaksanaan teknik pembelian terselubung oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kewenangan penyidik kepolisian untuk melakukan teknik pembelian terselubung telah diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Di dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang tersebut dengan jelas disebutkan bahwa kewenangan penyidik untuk melakukan pembelian terselubung. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah di dalam Undang-

⁵ Wawancara dengan Ipda Iwan Gunawan,SH , Kanit I Pembantu pada Kepolisian Metro Tangerang Kabupaten Sektor Sepatan, tanggal 29 Mei 2012. Dilengkapi dengan Berita acara pemeriksaan atas nama tersangka M.Ayatullah Albana

Undang tersebut tidak dijelaskan pengertian pembelian terselubung itu sendiri, sehingga sering ditafsirkan berbeda antara pihak penyidik kepolisian yang satu dengan yang lainnya.

Di dalam Surat Keputusan Kapolri No SKep/1205/IX/2000 tentang revisi himpunan Juklak dan Juknis proses penyidikan tindak pidana (buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan), diatur mengenai pelaksanaan dan teknik pembelian terselubung itu sendiri. Di dalam buku tersebut disebutkan bahwa sebelum dilakukannya pembelian terselubung ada beberapa tindakan penyelidikan yang harus dilaksanakan. Tindakan tersebut adalah observasi, *surveillance*, *undercover agent*, dan bam kemudian dilakukan pembelian terselubung oleh penyidik.

Obeservasi dilakukan penyidik atas dasar adanya informasi dari informan. Tujuan dilakukannya obeservasi tersebut adalah untuk mengecek kebenaran dan memperoleh data tentang pihak yang menjadi target operasi. Dalam hal ternyata data dan informasi mengenai target operasi tidak didapat sepenuhnya dalam pelaksanaan obeservasi, maka dapat diadakan pemptutan. Pemptutan ini dapat dilakukan terhadap orang, ataupun benda. Pelaksanaan pemptutan ini tidaklah dapat dilakukan secara asal-asalan. Petugas yang melakukan pemptutan haruslah menguasai teknik penyelidikan. Hal ini seperti apa yang diatur dalam petunjuk lapangan tentang penyelidikan yang telah direvisi oleh Surat Keputusan No. Skep /1205/IX/2000.

Apabila penyidik merasa masih kurang memperoleh bukti tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan target operasi, maka penyidik dapat melakukan penyusupan agen. Tentu saja petugas yang melakukan penyusupan agen ini haruslah pihak yang terlatih. Hal ini dikarenakan dalam melakukan penyusupan agen tidak dapat dilakukan dengan mudah karena harus memiliki kemampuan penyamaran yang tinggi untuk menghindari bahaya. Setelah bukti terkumpul barulah kemudian dilaksanakan teknik pembelian terselubung. Hal ini seperti apa yang diatur dalam Surat Keputusan No. Skep /1205/IX/2000.

Permasalahan yang muncul dalam pengaturan ini adalah di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 secara jelas di katakan bahwa pembelian terselubung ini adalah teknik penyidikan dan harus dilakukan oleh penyidik berdasarkan perintah tertulis dari pimpinan seperti apa yang tertulis dalam Pasal 79 Undang-Undang Narkotika. Sedangkan seperti apa yang telah diterangkan di atas, di dalam Surat Keputusan No SKep/1205/IX/2000 yang merevisi buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan diatur tentang pelaksanaan pembelian terselubung. Bila melihat petunjuk lapangan tersebut maka pembelian terselubung masuk dalam tindakan penyelidikan sedangkan berdasarkan Undang-Undang

Narkotika hal tersebut merupakan tindakan penyidikan. Dalam hal tersebut penulis berpendapat bahwa teknik pembelian terselubung merupakan suatu teknik penyidikan. Dengan diaturnya pelaksanaan teknik pembelian terselubung dalam buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan bukan berarti membuat teknik pembelian terselubung tersebut menjadi suatu teknik penyelidikan. Hal ini lebih dikarenakan teknik pembelian terselubung adalah merupakan teknik yang tidak dapat berdiri sendiri dan terkait dengan teknik penyelidikan lainnya.

Pembelian terselubung harus dilaksanakan oleh penyidik. Hal inilah yang diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Narkotika..Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, pelaksanaan teknik pembelian terselubung ini harus dilakukan oleh penyidik. Dan setiap hal yang dilakukan oleh penyidik haruslah berdasarkan perintah tertulis dari pimpinan. Dalam hal penyidik melakukan pembelian terselubung tanpa surat perintah tertulis dan pimpinan, maka dalam hal tersebut penyidik dapat ditindak dan dapat dijatuhi sanksi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam serangkaian kegiatan sebelum dan sampai dilakukannya pembelian terselubung tidak jarang penyelidik ataupun penyidik melakukan tindak pidana untuk mencapai keberhasilan pengungkapan jaringan pengedar narkotika. Mengenai tindak pidana yang dilakukan penyelidik atau penyidik tersebut telah diatur dalam buku petunjuk lapangan penyelidikan bahwa hal tersebut adalah diperbolehkan asal memenuhi persyaratan, yaitu harus dalam keadaan terdesak atau benar-benar harus dilakukan dan dalam pelaksanaannya harus diketahui dan disetujui pimpinan. Selain itu penyidik juga diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan menurut penilaiannya sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP dan Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian.

b) Analisis mengenai kedudukan Informan dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak pidana Narkotika berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Di dalam tindak pidana pada umumnya dimana proses penyelidikan dan penyidikannya diatur dalam KUHAP tindak dikenal dengan adanya istilah informan. Di dalam KUHAP yang dikenal adalah adanya laporan dan pengaduan. Hal ini dapat dilihat dan ketentuan Pasal 102 KUHAP dan Pasal 106 KUHAP yang masingmasing berbunyi: ⁶

Pasal 102

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No 35 Tahun 2009, Op.Cit,Pasal 102 dan Pasal 106.

Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan

Pasal 106

Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan.

Dan bunyi ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa dalam tindak pidana pada umumnya yang hukum acara penyelidikan dan penyidikannya diatur sepenuhnya oleh KUHAP hanya dikenal adanya laporan ataupun pengaduan dimana antara laporan dan pengaduan merupakan dua hal yang berbeda pengertiannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 24 KUHAP yang dimaksud dengan laporan adalah: ⁷

Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana.

Sedangkan pengaduan sendiri memiliki arti yang berbeda dengan laporan itu sendiri. Berdasarkan Pasal 1 angka 25 yang dimaksud dengan Pengaduan itu adalah: ⁸

Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan

Dari pengertian antara laporan dan pengaduan tersebut dapat dilihat dua hal yang berbeda. Perbedaan tersebut adalah pada pemberitahuan yang merupakan laporan kepada pihak yang berwenang hal tersebut merupakan kewajiban dan pihak yang berwenang untuk menindak tindak pidana yang dilaporkan tersebut. Dalam hal pihak yang melaporkan menarik kembali laporannya tidak serta merta dapat menghentikan pihak yang berwenang untuk menindak tindak pidana yang dilaporkan tersebut. Sedangkan pada pengaduan dilakukan atau tidaknya pemeriksaan tergantung pada permintaan dan si pengadu. Dalam hal pengadu menghendaki untuk tidak ditanganinya tindak pidana yang diadukannya tersebut maka pihak yang berwenang dapat menghentikan penanganan terhadap kasus yang diadukan tersebut.

Di dalam tindak pidana narkoba tidak dikenal adanya pengaduan. Semua proses penanganan tindak pidana narkoba ditangani dengan adanya laporan. Laporan yang diterima ini tidak harus dibuktikan dengan adanya tindak pidana yang terjadi pada saat laporan diberikan. Akan tetapi, hanya dengan memberikan informasi saja sudah dapat

⁷ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No 8 Tahun 1981, LN No 76 tahun 1981, TLN No.3209, Pasal 1 angka 24

⁸ *ibid*, Pasal 1 angka 25

dilakukan penanganan terhadap informasi yang didapatkan tersebut. Orang yang memberikan informasi biasanya dikenal dengan informan/Cepu. Pada kasus dapat dilihat Informan memberikan informasi kepada pihak kepolisian mengenai adanya penyalahgunaan narkoba.

Informan pada kasus tersebut berasal dari masyarakat biasa yang mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba karena pihak yang melakukan penyalahgunaan narkoba itu sendiri adalah teman sepermainannya di lingkungan tempat tinggalnya. Tindakan dan Informan disini adalah sudah benar karena telah melaporkan adanya penyalahgunaan narkoba jenis ganja kepada pihak yang berwenang. Hal ini seperti apa yang dituliskan dalam Pasal 131 Undang-Undang Narkotika yang berbunyi:⁹

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau dipidana denda paling banyak Rp 50,000,000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dari bunyi ketentuan dapat dilihat bahwa apabila seseorang yang mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, maka terhadap orang tersebut dapat dijatuhi sanksi seperti apa yang tertulis dalam ketentuan pasal di atas yaitu pidana denda atau penjara. Tindakan dari informan sudahlah benar, dengan dia melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungannya dia telah turut serta membantu pihak kepolisian untuk memberantas narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Lusiana Feni, ada beberapa jenis informan yang biasanya digunakan oleh pihak kepolisian. Informan tersebut ada yang merupakan pihak dan LSM, ada yang merupakan masyarakat biasa, pengedar lain yang karena persaingan kemudian memberikan informasi kepada pihak kepolisian dan pemakai itu sendiri yang mau untuk membantu pihak kepolisian.¹⁰ Di dalam kasus ini Informan berasal dari masyarakat biasa. Informan yang digunakan kepolisian bukanlah berasal dari LSM, pemakai atau bahkan pengedar. Informan yang merupakan masyarakat biasa ini memang memiliki hak untuk turut serta membantu pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Narkotika

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No 35 Tahun 2009, Op.Cit, Pasal 131

¹⁰ Wawancara dengan AKP Lusiana Feni, Wakil Kepala Satuan Reserse Narkotika Polresta Pontianak, 12 Agustus 2015.

Dimana dalam Undang-Undang ini diatur mengenai peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Di dalam Pasal 104 Undang-Undang Narkotika dituliskan:¹¹

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dari bunyi pasal tersebut jelas disebutkan bahwa masyarakat memiliki kesempatan dalam memberantas tindak pidana narkotika. Disini Informan adalah masyarakat yang memiliki keinginan untuk memberantas tindak pidana narkotika. Berdasarkan ketentuan pasal di atas jelaslah bahwa Infoman memang berhak untuk melaporkan dan memberikan informasi kepada kepolisian terkait adanya penyalahgunaan narkotika.

Dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika masyarakat diberikan hak untuk melakukan/mewujudkan keinginannya tersebut dalam bentuk tindakan seperti apa yang tertulis dalam Pasal 106 Undang-Undang Narkotika. Di dalam Pasal 106 Undang-Undang Narkotika dengan jelas dijabarkan hak-hak masyarakat dalam mewujudkan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dimana bunyi pasal tersebut adalah:¹²

Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika diwujudkan dalam bentuk:

- a. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
- e. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No 35 Tahun 2009, Op.Cit, Pasal 104.

¹² *Ibid*, Pasal 106

Berdasarkan ketentuan pasal di atas jelas dapat dilihat bahwa adalah hak dari informan untuk memberikan informasi. Akan tetapi, disini yang menjadi permasalahan adalah dengan dilibatkannya informan pada tahap penyidikan. Di dalam kasus diterangkan bahwa informan adalah pihak yang melakukan pembelian narkoba jenis ganja kepada tersangka. Bila melihat ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika maka tindakan yang dilakukan Informan adalah tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan dengan dia melakukan pembelian kepada tersangka maka ia dapat menjadi patut diduga sebagai pihak yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Di dalam Pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan jelas di tuliskan:¹³

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1,000,000,000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10,000,000,000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Bila melihat ketentuan pasal tersebut dapat dilihat dengan jelas tindakan dari Informan dapat dikatakan telah melanggar tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Sebab dengan dia melakukan pembelian narkoba jenis sabu-sabu kepada tersangka maka secara langsung selain dia melanggar ketentuan pelarangan untuk melakukan pembelian dia juga secara otomatis telah melanggar ketentuan menguasai narkoba.

AKP Lusiana Feni yang merupakan Wakasat Reskrim Narkoba Polresta Pontianak menyatakan bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap pihak yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba, penangkapan dilakukan dengan melihat posisi keberadaan barang (narkoba). Menurutny dalam penanganan tindak pidana narkoba pihak yang menguasai narkotikalah yang dapat dilakukan penangkapan. Bila dikaitkan dengan pendapat dari AKP Lusiana Feni tersebut maka terhadap informan yang melakukan pembelian narkoba pada pemancingan pertama kali dapat dilakukan penangkapan. Hal ini dikarenakan pada saat proses pemancingan yang pertama kali tersebut Informan lah yang memegang dan menguasai barang. Apabila diuraikan kronologis kejadiannya dimana pada saat pemancingan yang pertama kali, Informan dengan jelas melakukan pembelian. Dan pada saat pemancingan pertama tersebut Informan memberikan uang sebesar Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada tersangka kemudian tersangka memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Informan . Ketika pembelian selesai dilakukan dapat dilihat bahwa barang

¹³ *Ibid*, Pasal 114

berupa narkoba jenis sabu-sabu sudah berada ditangan Informan , sehingga dalam hal ini informan lah yang dapat dikenakan penangkapan pada pemancingan pertama. Akan tetapi, hal tersebut perlu dikaji lagi lebih jauh. Hal ini dikarenakan dalam ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Narkoba terdapat unsur tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga perlu diketahui apakah tindakan dari Informan merupakan tindakan yang melawan hukum atau tidak. J.M van Bemmelen berpendapat demikian mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum:¹⁴

Onrecht itu sekarang tidak hanya berkenaan dengan apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku, akan tetapi termasuk di dalamnya juga apa yang bertentangan dengan kepatutan atau tatasusila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepantasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain.

Bila melihat pengertian yang diberikan dari J.M van Bemmelen, maka tindakan yang dilakukan oleh informan tidaklah dapat dimasukkan dalam tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum. Hal ini dikarenakan tindakan yang dilakukan Informan adalah berdasarkan perintah dari pihak kepolisian. Dalam hal ini adalah pihak yang memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Narkoba untuk melakukan pembelian secara terselubung. Oleh karena perintah ini merupakan perintah yang diberikan oleh penyidik yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembelian terselubung, maka tindakan yang dilakukan oleh Informan merupakan suatu kewajiban hukum yang harus dilaksanakan. Permasalahan yang muncul selanjutnya adalah bagaimana bisa seorang warga masyarakat yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan diberikan kewenangan untuk melakukan pembelian terselubung tanpa suatu surat atau hanya dilakukan secara lisan. Memang benar dalam hal ini Informan tidak melakukan kesalahan, karena dalam hal ini Informan hanya menjalankan perintah dari penyidik untuk melakukan pembelian terselubung. Akan tetapi, bagaimana halnya dengan penyidik yang memberikan perintah kepada Informan untuk melakukan pembelian terselubung. Mengenai hal tersebut akan dijawab dengan mengaitkan konsep diskresi pada kepolisian.

Diskresi adalah wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas itu sendiri (Walker, 1983:54 dalam Barker, 1994).¹⁵ Dari pengertian ini dapat ditarik 3 (tiga) gambaran

¹⁴ P.A.F Lamintang dan C.Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik)*, Cet 1, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), hal 65, mengutip dan J.M Bemmelen, *Op de grenzen van het Starfrecht*, H.D Tjeenk Willink & Zoon N.V Haarlem, 1995, hal.52

¹⁵ Syaefurrahman Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi dalam mengungkap Jaringan Narkoba*, (Jakarta:Restu Agung, 2005), hal.34.

mengenai diskresi, yaitu yang pertama bahwa diskresi merupakan hak polisi berkaitan dengan asas kewajiban. Artinya kewajiban polisi dalam menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Kedua, diskresi harus berada dalam batasan hukum dan moral. Dan yang ketiga diskresi memungkinkan petugas untuk memilih sasaran tugasnya, taktik tugasnya, dan hasil akhir dan tugasnya.

Kewenangan untuk melakukan diskresi ini telah diberikan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Di dalam KUHAP kewenangan untuk melakukan diskresi ini dituliskan dalam Pasal 7 huruf j yang berisi:¹⁶

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Di dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia juga dituliskan mengenai pemberian kewenangan kepada pihak kepolisian untuk melakukan diskresi dalam penanganan perkara pidana. Pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) dengan jelas dikatakan:¹⁷

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Melihat kedua ketentuan pasal tersebut, maka polisi dalam melakukan penanganan suatu perkara dimungkinkan untuk mengambil tindakan menurut penilaiannya sendiri/ menyimpang dari aturan selama tindakan tersebut masih dalam suatu tataran hukum yang bertanggung jawab. Maksudnya adalah penggunaan diskresi pada kepolisian tidak boleh diterapkan secara sesuka hati oleh kepolisian. Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan beberapa asas, yaitu asas keperluan, asas masalah, asas tujuan dan asas keseimbangan.

Pada kasus dapat dilihat dan kronologi penangkapannya bahwa Informan digunakan sebagai pihak yang melakukan pembelian pada tahap penyelidikan maupun penyidikan dengan teknik pembelian terselubung oleh kepolisian. Apabila dilihat secara sekilas maka tindakan dan kepolisian ini adalah penerapan dari diskresi

¹⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No 8 Tahun 1981, Pasal 7 huruf j.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia*, UU No 2 Tahun 2002, LN.No 2 Tahun 2002, TLN No.4168, Pasal 18 ayat (1) dan (2).

yang dimiliki oleh kepolisian, dimana dalam hal ini kepolisian telah melakukan penyimpangan dengan menggunakan Informan untuk melakukan pembelian narkoba jenis sabu-sabu kepada tersangka. Padahal dalam ketentuan pidana pada Undang-Undang Narkotika jelas dikatakan bahwa setiap orang yang membeli Narkotika dapat dikenakan sanksi. Selain itu dalam Pasal 106 Undang-Undang Narkotika juga sudah jelas disebutkan bahwa perwujudan tindakan masyarakat untuk membantu dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah hanya sebatas mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai adanya dugaan penyalahgunaan narkoba, bukan ikut serta dalam suatu penyidikan apalagi pada suatu proses yang membahayakan din masyarakat tersebut.

Apabila dikaitkan dengan keempat asas yang harus diperhatikan dalam melaksanakan diskresi, yaitu asas keperluan, asas masalah, asas tujuan dan asas keseimbangan, maka tindakan dari kepolisian tersebut tidak memenuhi salah satu asas yang disebutkan di atas. Dikaitkan dengan asas keperluan maka pelaksanaan pembelian terselubung dengan menggunakan Informan sebagai pembeli yang menyamar tidaklah memenuhi asas ini. Sebab menurut asas ini suatu tindakan yang menyimpang tersebut dapat dilakukan bila benar-benar memang diperlukan. Kata memang diperlukan ini berarti memiliki maksud apabila tidak ada tindakan lain lagi yang dapat dilakukan untuk menangkap pelaku selain tindakan tersebut. Akan tetapi, bila dicermati dalam kasus ini penggunaan Informan untuk menyamar sebagai pembeli bukanlah hal yang paling diperlukan. Karena pada dasarnya penyamaran sebagai pembeli bisa dilakukan oleh pihak kepolisian itu sendiri.

Apabila dianalisis secara lebih mendalam, maka didapati adanya kelemahan dan penggunaan diskresi pada kasus ini. Kelemahan tersebut adalah pihak kepolisian tidak memperhitungkan keamanan dan keselamatan jiwa dari Informan. Dimana seharusnya hal tersebut adalah hal yang paling utama untuk diperhatikan. Di dalam pasal 106 huruf e dengan jelas dikatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum pada saat melaksanakan haknya. Dan hal ini diperkuat dengan adanya ketentuan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang berbunyi:¹⁸

Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang dalam pemeriksaan,

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No 35 Tahun 2009, Op.Cit, Pasal 99 ayat (1).

dilarang menyebutkan nama, alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor

Dan ketentuan pasal di atas jelaslah bahwa keselamatan informan adalah hal yang sangat perlu untuk diperhatikan. Akan tetapi, dalam kasus ini Informan malah digunakan sebagai pihak yang menyamar untuk melakukan pembelian. Dimana dari tindakannya tersebut tersangka dapat mengetahui siapa yang melaporkan dirinya, sehingga dapat berakibat terhadap keselamatan jiwa dari Informan.

Petunjuk Lapangan Kapolri Nomor Pol.JUKLAP/69/II/1993 dengan jelas menyebutkan Informan atau saksi yang memberitahukan atau melaporkan tentang adanya tindak pidana narkoba tidak diperkenankan dihadapkan sebagai saksi. Ketentuan Juklap ini jelas dimaksudkan untuk melindungi Informan/saksi yang telah membantu kepolisian untuk memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan pelaku kejahatan narkoba. Di dalam kasus justru yang terjadi bertentangan dengan apa yang diatur dalam ketentuan Juklap ini. Informan digunakan sebagai pihak yang melakukan pembelian secara terselubung. Dengan digunakannya Informan untuk melakukan pembelian terselubung, maka kerahasiaan dari identitas Informan sudah terbongkar dan hal tersebut dapat membahayakan jiwanya atau bahkan keluarganya. Pada proses penyelidikan dan penyidikan pada kasus di atas, seharusnya informan Mr hanya dapat bertindak sampai sebatas memberikan informasi atau sejauh-jauhnya dia bertindak hanya sampai menunjuk pelaku, memberikan alamat dan kebiasaan sipelaku. Sedangkan tindakan selanjutnya seharusnya dilaksanakan oleh penyidik itu sendiri.

AKP Lusiana Feni menyatakan dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung penggunaan Informan atau saksi sebagai pembeli hingga terjadinya penyerahan barang berupa Narkoba bukanlah bagian dan diskresi akan tetapi telah masuk dalam pelanggaran. Menurutnya setiap tindakan yang dilakukan dalam pembelian terselubung itu harus disertai surat perintah dan pimpinan dan diketahui pimpinan. Sehingga bagaimana mungkin Informan yang merupakan masyarakat biasa mendapatkan surat perintah untuk melakukan pembelian dan pimpinan. Dalam hal apabila dilakukan penangkapan oleh penyidik kepolisian lain ketika proses pembelian terselubung tersebut dilakukan ternyata barang berupa narkoba tersebut berada di tangan Informan yang menyamar, maka terhadap informan tersebut tetap dapat dilakukan penangkapan. Menurut AKP Lusiana Feni dalam hal hanya dengan

cara informan menyamar sebagai pembeli baru bisa mengungkap jaringan narkoba, maka informan disini harus benar-benar diawasi ketika melakukan transaksi dengan tersangka, agar dalam transaksi yang dilakukan sebelum pemindahan barang berupa narkoba terjadi sudah dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Apabila pendapat AKP Lusiana Feni ini dikaitkan dengan kasus, maka sudah jelas terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan pihak penyidik kepolisian dengan menggunakan informan sebagai pihak yang melakukan pembelian pada tahap penyidikan. Hal ini dikarenakan pada kasus disebutkan bahwa pada tahap pembelian pertama dan kedua Informan melakukan pembelian sampai terjadinya penyerahan barang yaitu berupa narkoba jenis ganja, dimana menurutnya hal tersebut tidaklah dapat dibenarkan. Karena masyarakat tidak memiliki hak untuk melakukan kewenangan tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Narkoba dengan jelas disebutkan:¹⁹

*Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh **Penyidik** atas perintah tertulis dari atasan.*

Dan ketentuan pasal tersebut jelas bahwa yang berwenang melakukan pembelian terselubung hanyalah penyidik dan berdasarkan perintah tertulis dan atasan. Dalam hal Informan digunakan sebagai orang yang menyamar sebagai pembeli maka harus dilakukan suatu pengawasan yang ketat dan hati-hati agar sebelum dilakukan perpindahan barang dan pelaku ke Informan sudah dilakukan penangkapan.

c) Analisis Pelaksanaan teknik Pembelian Terselubung Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. dan Kendala Penyidik dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung.

Pada bagian ini akan dianalisis prosedur dilakukannya teknik pembelian terselubung dan tahap diterimanya informasi, penyelidikan, sampai proses penangkapan dengan teknik pembelian terselubung. Pada kasus dapat dilihat rangkaian tindakan dari kepolisian dan menerima informasi hingga dilakukannya penangkapan terhadap tersangka. Pada kasus dapat dilihat bahwa proses

¹⁹ *Ibid*, Pasal 79

penyelidikan dan penyidikan kasus diawali dari adanya informasi dari Informan. Informan menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan pemakaian narkoba. Informan mengetahui hal tersebut karena pelaku yang melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut adalah temannya sendiri. Dan informasi yang didapat tersebut kemudian pihak kepolisian melakukan penajaman informasi dengan proses penyelidikan. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHP yang dimaksud dengan penyelidikan adalah:²⁰

Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan Informan kemudian penyidik melakukan penyelidikan dengan teknik observasi. Pada kasus ini penyidik tidak melakukan teknik pembututan (*Surveillance*) dan penyusupan agent (*Undercover agent*). Observasi dilakukan oleh beberapa anggota kepolisian Narkoba Polresta Pontianak. Hal ini dilakukan guna mengumpulkan informasi yang lebih tajam mengenai kebenaran informasi yang diberikan Informan. Berdasarkan Pasal 75 huruf a Jo. Pasal 81 Undang-Undang Narkoba pelaksanaan teknik penyelidikan berupa observasi ini adalah memang merupakan kewenangan yang diberikan kepada penyidik. Dimana bunyi dan ketentuan pasal tersebut adalah:²¹

Pasal 75

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba.

Pasal 81

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba berdasarkan Undang-Undang ini.

Berdasarkan bunyi ketentuan pasal di atas maka tindakan penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian adalah sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

Setelah semua data yang dibutuhkan didapatkan dan informasi yang diberikan oleh Informan telah teruji kebenarannya kemudian penyidik melakukan teknik pembelian terselubung. Dalam tahap ini, dikarenakan data dan ciri-ciri pelaku telah didapatkan secara jelas dari informan dan masyarakat, maka seharusnya sudah dapat langsung

²⁰ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Undang-Undang No 8 Tahun 1981, Op.Cit, Pasal 1 angka 5.

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Narkoba*, UU No 35 Tahun 2009, Op.Cit, Pasal 75 dan Pasal 81

dilakukan teknik penangkapan dengan penyamaran pembelian terselubung oleh penyidik. Akan tetapi, penyidik tidak melakukan penangkapan tersebut. Penyidik malah melakukan pemancingan dengan menggunakan informan yang melakukan penyamaran. Tindakan yang dilakukan penyidik ini jelas merupakan tindakan yang kurang tepat karena menggunakan informan untuk menyamar. Dimana seharusnya penyidik mengetahui bahwa dengan penyamaran yang dilakukan tersebut dapat membahayakan keselamatan jiwa informan tersebut. Seharusnya dalam hal penyidik belum yakin betul dan belum dapat melakukan teknik pembelian terselubung maka penyidik dapat menugaskan penyidik untuk mengumpulkan informasi dengan teknik pembututan ataupun penyamaran agen seperti yang telah diatur dalam SK Surat Keputusan Kapolri No SKep/1205/IX/2000, tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis proses Penyidikan Tindak Pidana.

Surat Keputusan tersebut secara jelas mengatur cara-cara untuk memperoleh dan mempertajam informasi yang didapatkan. Di dalam SK tersebut juga telah diatur tentang bagaimana cara pelaksanaan pembututan dan penyamaran agen. Dengan dilakukannya pembututan ini maka bukti kejahatan yang ingin diperoleh penyidik dan penyidik dapat diperoleh. Akan tetapi yang dilakukan dalam kasus berbeda dengan yang telah diatur dalam SK Kapolri ini. Kepolisian malah menggunakan Informan sebagai pihak yang melakukan pembelian narkoba kepada tersangka. Padahal patut diketahui tindakan tersebut dapat membahayakan diri informan dan keluarganya. Apabila kepolisian hanya ingin melakukan pemancingan pada saat itu dan tidak disertai penangkapan, tindakan tersebut seharusnya dilakukan oleh salah satu anggota dan kepolisian itu sendiri, bukan dengan menggunakan informan. Sedangkan pada kasus pada pemancingan pertama yang digunakan adalah informan.

Briptu AP yang merupakan penyidik pada kasus ini mengatakan bahwa tindakan pengebakan berupa pembelian narkoba kepada tersangka yang dilakukan pertama kali masih merupakan masuk rangkaian penyelidikan. Apabila melihat rangkaian kronologinya maka apa yang dikatakan Briptu AP tersebut adalah salah. Tindakan pembelian narkoba yang pertama kali dilakukan oleh informan tersebut adalah tindakan penyidikan. Hal ini mengingat pengertian penyidikan yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHP yang berbunyi:²²

²² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Undang-Undang No 8 Tahun 1981, Op.Cit, Pasal 1 angka 2.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Melihat pengertian pasal di atas jelaslah bahwa tindakan pembelian pertama kali yang dilakukan oleh informan sudah masuk dalam tahap penyidikan. Sebab pada saat pembelian ini dilakukan pihak kepolisian sudah mengetahui secara jelas data dan ciri-ciri dan pelaku dan informan. Kepolisian juga sudah mengetahui dari masyarakat daerah tempat tinggal pelaku bahwa pelaku sering melakukan pemakaian dan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan tersebut telah jelaslah terjadi suatu tindak pidana. Kemudian untuk membuat terang tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut dikumpulkanlah barang bukti. Untuk mengumpulkan barang bukti inilah digunakan teknik pembelian terselubung yang merupakan teknik yang menggunakan pola *Buy —Bsut Technique* /Teknik beli langsung tangkap.

Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 1 angka 2 di atas jelas dapat dilihat bahwa penyidikan adalah suatu tindakan yang berorientasi pada barang bukti. Hal ini berbeda dengan penyelidikan yang berorientasi pada suatu perbuatan. Seperti yang dijelaskan di atas teknik pembelian terselubung itu sendiri adalah suatu teknik yang dilakukan untuk memperoleh atau mendapatkan barang bukti. Sehingga tindakan pemancingan dengan pembelian terselubung pertama yang dilakukan informan merupakan teknik pembelian terselubung. Dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan oleh penyidik berdasarkan surat tertulis dari pimpinan.

Pada pemancingan kedua dapat dilihat pada kasus, juga dilakukan oleh informan yang menyamar sebagai pembeli. Disini penyidik juga telah melakukan kesalahan. Dimana informan dilibatkan kembali dalam proses penyamaran dalam tindakan pembelian terselubung. Berbeda dengan pemancingan pertama. Pada pemancingan kedua ini penyidik telah bersiap untuk melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti. Seperti yang diatur dalam KUHAP bahwa dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan harus disertai dengan surat perintah, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Bila kita lihat sekilas penangkapan dengan teknik pembelian terselubung ini seperti suatu penangkapan secara tertangkap tangan. Hal tersebut terlihat demikian karena penangkapan dilakukan pada saat sipelaku melakukan tindak pidana. Akan tetapi, bila dicermati lebih mendalam, penangkapan pada kasus ini bukanlah penangkapan secara tertangkap tangan. Hal ini dikarenakan teknik pembelian terselubung ini merupakan suatu teknik yang

menggunakan rekayasa tempat kejadian. Dimana dalam hal ini penyidik telah merekayasa tempat, sehingga pada saat dilakukan penangkapan, penyidik telah siap dengan segala surat perintah baik penangkapan, penggeledahan maupun penyitaan. Pada kasus di atas dapat dilihat dalam pada berita acara pemeriksaannya, pada saat melakukan penangkapan, penyitaan, dan penggeledahan telah disertai surat perintah terlebih dahulu dari pimpinan.

Melihat rangkaian kegiatan yang panjang tentunya dapat dilihat suatu permasalahan dalam pelaksanaan yang paling utama yaitu dana pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan. Hal ini juga dibenarkan oleh AKP Lusiana Feni dan Ipda Iwan Gunawan,SH. Mereka mengatakan bahwa dana adalah masalah utama. Hal ini dikarenakan anggaran yang disediakan untuk penyelidikan dan penyidikan adalah terbatas, sedangkan untuk mengungkap jaringan narkoba yang lebih besar diperlukan dana yang sangat besar. Permasalahan inilah yang membuat pihak kepolisian dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba lebih berfokus pada bandar bukan pemakai. Bahkan sering sekali pihak kepolisian melepas dan tidak melakukan penangkapan kepada bandar yang kecil dikarenakan dana yang kurang memadai. Pihak kepolisian lebih fokus kepada pemberantasan bandar yang lebih besar. Selain itu kesulitan lainnya menurut Ipda Iwan Gunawan,SH adalah kurangnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, sehingga pihak kepolisian merasa kesulitan dalam memberantas tindak pidana narkoba. Hal ini dikarenakan tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang sangat sulit untuk diungkap dan merupakan tindak pidana yang sering dilakukan di suatu lingkungan masyarakat, sehingga diperlukan peran serta masyarakat dalam memberantas tindak pidana narkoba. Hal inilah yang membuat pihak kepolisian sering sekali merekrut pemakai untuk membantu pihak kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, dengan anggapan bahwa pemakai setidaknya mengetahui dunia narkoba dan mengenal pada bandar-bandar narkoba. Mengenai perekrutan pemakai ini dapatlah dibenarkan dengan kewenangan kepolisian yaitu diskresi. Akan tetapi, dengan catatan pemakai yang direkrut haruslah direhabilitasi dan diobati agar ketergantungannya terhadap narkoba hilang. Hal ini juga dibenarkan oleh AKP Lusiana Feni. Beliau mengatakan bahwa untuk mengatasi permasalahan kurangnya keaktifan masyarakat untuk memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba dilakukan perekrutan informan yang merupakan bekas pemakai atau bahkan pemakai itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa penggunaan teknik pembelian terselubung memang merupakan teknik yang sangat perlu dilakukan untuk mengungkap jaringan narkoba, dimana kewenangan penyidik untuk melakukan

pembelian terselubung telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika.. Selain itu dalam pelaksanaannya juga telah diatur dalam buku petunjuk lapangan penyelidikan yang telah direvisi dengan Surat keputusan No Skep/1205/IX/2000 dan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah baik dalam undang-undang maupun petunjuk lapangan tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pembelian terselubung itu sendiri, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam penerapan pada prakteknya. Hal ini dapat dilihat dan uraian sebelumnya dimana sebagian ada penyidik yang menganggap pembelian terselubung ini merupakan teknik penyidikan dan sebagian lagi menganggap bahwa pembelian terselubung merupakan teknik penyidikan. Selain itu sering terjadi kesalahan penggunaan informan/masyarakat dalam penerapan pembelian terselubung. Dimana seharusnya informan hanyalah pihak yang memberikan informasi dan tidak dilibatkan dalam pembelian terselubung, tetapi dilibatkan dalam pembelian terselubung. Pada pelaksanaannya yang menjadi masalah paling utama adalah dana yang kurang memadai, sehingga sering sekali pihak kepolisian yang tau dengan jelas ada penyalahgunaan berupa pemakaian narkoba oleh seseorang tidak dilakukan penangkapan, karena pihak kepolisian menganggap lebih baik dana digunakan untuk menangkap pengedar.

Kesimpulan

Kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pembelian terselubung (*Undercover buy*) telah diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkoba, sehingga dalam pelaksanaannya adalah sah. Pengaturan ini telah dituangkan dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkotika junto Pasal 81 Undang-Undang Narkotika. Akan tetapi dalam Undang-Undang ini tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pembelian terselubung itu sendiri, sehingga sering menimbulkan penafsiran yang berbeda antara penyidik yang satu dengan yang lainnya. Dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung tidak dapat dipisahkan dengan teknik-teknik penyelidikan. Dimana teknik penyelidikan tersebut adalah *obeservasi*, *surveillance*, dan *undercover agent*. Mengenai pelaksanaan teknik penyelidikan ini telah diatur dalam buku petunjuk lapangan penyelidikan yang telah direvisi dengan Surat Keputusan Kepolisian No SKep/1205/IX/2000 tentang revisi terhadap himpunan Juklak dan Juknis proses penyidikan tindak pidana. Dalam pelaksanaannya, teknik pembelian terselubung harus dilakukan oleh penyidik berdasarkan surat

perintah tertulis dan pimpinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Narkotika yang secara tegas menyatakan teknik pembelian terselubung harus dilakukan atas perintah tertulis dari penyidik. Apabila pada saat penyamaran sebelum dilakukannya teknik pembelian terselubung petugas yang melakukan penyamaran dalam keadaan terpaksa harus melakukan tindak pidana maka hal tersebut diperbolehkan selama hal tersebut diketahui oleh pimpinan. Hal sesuai dengan apa yang diatur dalam buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan yang telah direvisi oleh Surat Keputusan No SKep/1205/IX/2000, dimana dalam buku tersebut secara jelas disebutkan bahwa jika karena situasi terpaksa harus melibatkan diri dalam suatu tindak pidana, maka kegiatan tersebut harus sepengetahuan dan dengan persetujuan pimpinan. Selain itu tindakan petugas tersebut juga dilindungi oleh ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang secara jelas disebutkan bahwa polisi dapat bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri selama tindakannya tersebut tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ayat (2) Pasal 18 tersebut.

Berbeda dengan tindak pidana pada umumnya, dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika dikenal dengan adanya informan. Informan dalam tindak pidana narkotika berasal dari masyarakat biasa, Lembaga Swadaya Masyarakat, pemakai atau pengedar narkotika itu sendiri. Kedudukan informan dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung hanyalah sebatas memberikan, memperoleh dan mencari informasi. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 106 Undang-Undang Narkotika. Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Narkotika tersebut masyarakat tidak boleh terjun/terlibat langsung dalam proses pembelian terselubung tersebut apalagi menyamar sebagai pembeli. Hal ini dilakukan guna melindungi diri informan dari tindakan-tindakan yang membahayakan dirinya oleh sipelaku. Apabila dalam pelaksanaannya terpaksa menggunakan informan untuk menyamar dalam melakukan pembelian, maka dalam pelaksanaan tersebut harus diketahui dan disetujui oleh pimpinan. Selain itu pada saat pelaksanaannya harus benar-benar diawasi dan dijaga dengan ketat keselamatan dan si Informan. Hal ini dikarenakan di dalam Undang-Undang Narkotika pun telah dijamin perlindungan terhadap masyarakat yang membantu proses pemberantasan penyalahgunaan narkotika dimana tepatnya pada Pasal

100. Didalam pasal tersebut dengan jelas dinyatakan saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum dan hakim yang memeriksa tindak pidana narkoba wajib diberi perlindungan oleh negara. Mengenai penggunaan informan dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung memang tidak diatur secara tegas dalam suatu peraturan. Akan tetapi, secara implisit hal tersebut diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu mengenai diskresi kepolisian, dimana pihak petugas kepolisian diperbolehkan untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan penilaiannya sendiri, selama dalam pelaksanaannya ketika terjadi pembelian narkoba dengan pelaku pada saat terjadi serah terima barang informan tidak boleh sampai memegang barang yang dibelinya tersebut. Jadi, dalam hal ini pihak penyidik harus bertindak cepat untuk langsung melakukan penangkapan sebelum dilakukannya serah terima barang.

Penerapan teknik pembelian terselubung dalam prakteknya telah dilaksanakan. Dalam proses penangkapan **Abong** penyidik menerapkan teknik pembelian terselubung untuk menangkap tersangka. Akan tetapi, pada proses penangkapannya tidak dilaksanakan sesuai yang seharusnya. Dimana disini penyidik dalam melakukan pembelian terselubung menggunakan informan. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa kedudukan informan dalam pembelian terselubung hanyalah sebatas sampai memberikan informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Narkotika, tetapi dalam proses penangkapan tersangka **Abong** penyidik menggunakan informan untuk melakukan pembelian. Dimana seharusnya penyidik mengetahui secara pasti bahwa hal tersebut dapat membahayakan jiwa informan. Pada kasus juga dapat dilihat bahwa penyidik menggunakan informan untuk melakukan pembelian sebanyak dua kali. Padahal teknik pembelian terselubung adalah sebuah teknik yang dalam pelaksanaannya adalah dengan membeli langsung tangkap. Apabila memperhatikan pendapat petugas, maka dapat dilihat dengan jelas ketidakmengertian petugas dalam penerapan pembelian terselubung. Masih ada petugas yang memahami pembelian terselubung adalah teknik penyelidikan. Hal ini dikarenakan di dalam buku petunjuk lapangan penyelidikan yang telah direvisi oleh Surat Keputusan No SKep/1205/X112000 pembelian terselubung sendiri masih dianggap sebagai suatu tindakan penyelidikan. Padahal di dalam Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 dengan jelas disebutkan bahwa teknik

pembelian terselubung adalah teknik penyidikan yang harus dilakukan oleh penyidik. Hal inilah yang menyebabkan petugas salah menerapkannya dalam praktek dan sering digunakan dalam tahap penyelidikan. Sehingga sering sekali praktek pembelian terselubung ini dilakukan lebih dari satu kali. Kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembelian terselubung ini adalah kurangnya warga masyarakat yang mau terlibat untuk memberantas penyalahgunaan narkoba. Masih banyak masyarakat yang takut untuk melaporkan tindak pidana narkoba yang terjadi dilingkungannya karena menyangkut keamanannya. Selain itu masalah besar lainnya yang dihadapi petugas kepolisian adalah masalah dana. Tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung tentu saja memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar. Hal ini dikarenakan banyak tahapan yang harus dilakukan sebelum dilakukannya teknik pembelian terselubung. Permasalahan dana adalah permasalahan yang paling sering menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelian terselubung. Sehingga sering sekali petugas kepolisian yang mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba, tetapi masih merupakan penyalahgunaan narkoba yang kecil tidak memprosesnya karena dana yang kurang.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Kencana, Jakarta, 2009.
- Al-Banjary, Syaefurrahman. *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, Jakarta: PTIK Press, 2005.
- Andi Widjajanto, Cornelis Lay dan Makmur Keliat. *Intelijen: Velox et Exacatus*. Jakarta: Pacivis; Center for Global Civil Society Studies dan Kemitraan, 2006.
- Bambang Poernomo Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005.
- _____, Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.
- _____, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- _____, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bhakti, 1998.
- _____, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007.
- _____, RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Pustaka Magister Semarang, 2008.
- _____, Perkembangan Asas hukum Pidana Indonesia, Pustaka Magister Semarang, 2008.
- _____, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana, Jakarta, 2008.
- _____, Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan : Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
- _____, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks SISKUMNAS dan BANGKUMNAS, Makalah dalam Seminar “Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif”, FH UNDIP, 19 Desember 2009.
- Dann Sugandha, Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administasi, Inter Media, Jakarta, 1991.
- Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005.

- Friedman, Lawrence W. *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, W.W. Norton & Company, New York, 1984.
- _____, *American Law An Introduction, Second Edition*, diterjemahkan Wishnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, 2001.
- Hartono Hadisoeparto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 1982.
- H.R Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Is Susanto, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1995.
- Mardjono Reksodiputro, “Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi””, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.
- _____, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, dikutip dari, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, 1994.
- _____, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1994.
- M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, FE UI, Jakarta, 1996.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994.